

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Andora, Hengki, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2000, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal BPK, Jakarta.
- Bhakti, Teguh Satya, 2022, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.
- Black, Henry Cambell M.A., 1990, "*Black's Law Dictionary*", Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhanuddin, Nizam, 2015, *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Jakarta.
- Erwinsyahbada, Tengku, *et. all.*, 2018, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, Vol 5, Issue 2.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Finer, Herman, 1962, *The Major of Governments of Modern Europe*, Haper and Row, Evanston and London: Publisher New York.
- Hadjon, Philipus M., *et. all.*, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Krisna 2005, *Hukum Acara Perdata : Class Action, Arbitrase&Alternatif serta Mediasi*, PT Grafitri Bandung, Bandung.
- HD, Stout, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- HR, Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.

- , 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- , 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jhon, M. Yusuf dan Dwi Setiawan, 2009, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamil, Faizal, 2005, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Kusuma, Johan, 2019, "Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Untuk Menyetorkan Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain Apabila Menunjukkan Nilai yang Berbeda Dengan Penetapan Kerugian Negara oleh Pemerintah," Tesis Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
- Kurnia, Beni dan Ikhsan Alia, 2017, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017.
- Marbun, S.F., 2014, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nisjar, Kahri, 1998, *Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Saidi, Muhammad Djafar 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Stroink, F.A.M dan J.G. Steenbek, 2008, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht, dalam Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Subekti and Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.

Suherman, Ade Maman, 2010, *Pengadaan barang/jasa Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan International*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syafrudin, Ateng, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, Universitas Parahiyangan.

Poewardaminta, W.J.S. 1976, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.

Tjandra, W Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Warman, Kurnia, 2021, *Laporan Penelitian Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsep Negara Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286.

Repubik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*", Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6018.

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*", Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah*”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5601.

Presiden Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “*Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9/K-XIII.2/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa*.”

Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6322.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”.

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg.

D. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2025 jam 11.00.

<https://pn-wangiwangi.go.id/hukum/prosedur-eksekusi.html>, diakses tanggal 17 Desember 2025 pukul 22.15 wib.

